LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS AKSES DESA-DESA DI KABUPATEN BANDUNG TERHADAP SUMBER-SUMBER PRODUKTIF

(Suatu Analisis dengan Pendekatan Integrated Rural Accessibility Planning)

Oleh:
Iwan Setiawan, SP., MSi
NIP. 132 206 502

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2001 Indonesia sudah secara legal menerapkan kebijakan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Disamping itu, di Indonesia, terutama di Pulau Jawa telah pula dikembangkan pusat-pusat pelayanan publik. Khusus untuk pembangunan pertanian, sebagai contoh di Jawa Barat, pemerintah telah mengembangkan sumber-sumber informasi, seperti Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Besar Diklat Agribisnis Hortikultura (BBDAH), Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Diklat Pertanian (BDP), Balai Penelitian Padi (Balitpa) dan Balai Benih (BB).

Terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kini perguruan tinggi pertanian (PT), baik negeri maupun swasta, dikembangkan di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota. Sebagai contoh, di Jawa Barat, hingga tahun 2005 terdapat sekitar 17 perguruan tinggi yang memiliki fakultas/jurusan pertanian. Secara umum, selain ITB, IPB, Unpad, UPI, Unpas, Unisba, Unpar, hampir di setiap daerah di Jawa Barat juga terdapat perguruan tinggi. Selain itu, juga terdapat banyak lembaga penelitian, lembaga pengkajian, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan agribisnis, konsultan, industri pengolahan dan lembaga pemberdayaan.

Pada tataran yang lebih sempit, seperti di Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu contoh daerah pinggiran kota[1] dari Kota Bandung (Ibukota Provinsi Jawa Barat), infrastruktur dan sumber-sumber produktif jauh lebih lengkap dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan daerah-daerah lainnya. Selain lembaga-lembaga yang

[1] Ponco (1994), menyatakan bahwa daerah pinggiran kota merupakan zona transisi dalam karakteristik penggunaan lahan, sosial, dan demografi. Jika komunikasi petani secara umum berada dalam kondisi yang lemah, maka petani di pinggiran kota akan berada pada kondisi yang sangat parah. Kecenderungannya, masyarakat (termasuk petani) di pinggiran kota akan lebih cepat terimbas oleh dampak globalisasi ekonomi dan informasi. Pola komunikasi yang semakin terbuka dan intensif atas "dunia luar" dapat saja berdampak positif atau negatif terhadap petani itu sendiri. Implikasinya, distribusi informasi akan lebih banyak datang dari luar ketimbang dari lokal.

disebutkan pada dua paragraf di atas, **Dinas Perindustrian Jawa Barat (2004),** juga mencatat bahwa di wilayah Bandung Raya terdapat tidak kurang dari 67 unit supermarket dan hypermarket, 100 unit lebih minimarket dan 120 lebih pasar tradisional. Di Kabupaten Bandung, media dan fasilitas komunikasi, seperti televisi, radio, telepon (atau *handphone*), surat kabar, buku, majalah dan sebagainya, hampir menjangkau ibukota desa-desa**.** Menurut **CRI (2002)**, di Kabupaten dan Kota Bandung terdapat sekitar 17 radio komunitas dan sekitar 34 radio komersial **(PRSSNI Jawa Barat, 2004)**. Secara umum, masyarakat Kabupaten Bandung juga dapat mengakses sekitar 12 siaran televisi nasional, 4 siaran televisi lokal, 7 surat kabar nasional dan 5 surat kabar lokal.

Disamping itu, di Kabupaten Bandung juga terdapat kelompok sosial dan lembaga ekonomi pedesaan, seperti: pesantren, koperasi simpan pinjam, bank perkreditan rakyat, lumbung desa, toko sarana produksi pertanian dan kelembagaan non formal lainnya. Sedangkan media komunikasi lokal atau ajang-ajang dialog sosial --jika meminjam istilah **Soetarto, 1999**-- yang masih eksis ditengah-tengah masyarakat desa adalah kegiatan pengajian, karang taruna, pertemuan rutin desa, musyawarah dan gotong royong. Disamping itu, juga terdapat jaring-jaring sosial (*coping mechanisme*) yang berperan dalam penyebaran informasi, perlindungan sosial (keamanan pangan) dan keamanan lingkungan.

Pertanyaannya, apakah dalam bangunan ekonomi-politik yang otonom dan iklim modernitas yang diwarnai oleh banyaknya program pembangunan, beragamnya lembaga penelitian dan pengabdian (perlindungan), membaiknya fasilitas (jalan, listrik, transfortasi), canggihnya teknologi komunikasi dan informatika, banyak dan beragamnya sumber informasi, berkembangnya kelembagaan sosial ekonomi, berkembangnya relasi-relasi sosial ekonomi (seperti kemitraan), serta berkembangnya dunia pendidikan (formal dan non-formal) seperti sekarang ini, aksesibilitas desa-desa di Kabupaten Bandung masih tetap berada pada kondisi yang lemah (*powerless*) atau sudah mengalami perubahan?

Pertanyaan tersebut menarik untuk diungkap karena menurut **Tubbs** dan **Moss (1996)** dan **Purwasito (2003),** tidak semua daerah dan lapisan masyarakat memiliki kemampuan yang sama, baik dalam mengakses media dan informasi maupun dalam pengambilan keputusan. Menurut **Berlo (1960)**, orang pada kelas sosial dan karakteristik lokasi yang berbeda cenderung akan berkomunikasi secara berbeda pula. **Collier *et all.,* (1996)**, mengatakan bahwa hal itu terjadi

karena setiap zona agroekosistem memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang cenderung berbeda. Karakteristik pertanian di zona ekologi sawah diduga berbeda dengan pertanian di zona ekologi lahan kering. Begitu juga halnya dengan pertanian di pedesaan dengan pertanian di pinggiran kota dan diperkotaan. Menurut **FAO (1999)**, kecenderungan pertanian pinggiran kota diwarnai dengan tingkat persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan, air, energi dan tenga kerja.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat drumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat aksesibilitas desa-desa yang mencerminkan akses masyarakat desa di Kabupaten Bandung terhadap sumber-sumber produktif?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kuat-lemahnya akses desa-desa di Kabupaten Bandung terhadap sumber-sumber produktif?
3. Adakah dampak kuat-lemahnya tingkat aksesibilitas desa-desa di Kabupaten Bandung terhadap dinamika pembangunan di Kabupaten Bandun?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tingkat aksesibilitas desa-desa di Kabupaten Bandung berdasarkan karakteristik zona agroekosistem. Dengan terungkapnya tingkat aksesibilitas, maka akan diketahui desa-desa yang memiliki akses kuat, akses sedang dan akses lemah terhadap sumber-sumber produktif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti, hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang akses desa-desa dan meningkatkan pemahaman aplikasi metode IRAP (Integrated Rural Accessibility Planning). Secara praktism hasil kajian juga diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi para peneliti selanjutnya dan bagi para pelaku perencanaan pembangunan pedesaan di Kabupaten Bandung.

1.5 Pendekatan Masalah

Aksesibilitas (*accessibility*) didefinisikan oleh **Warpani (2002)** sebagai tingkat kemampuan untuk mencapai atau mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Menurut **Parikesit *et al.* (2002)**, akses adalah tingkat kesulitan atau kemudahan penduduk untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Akses yang tinggi akan tercipta jika kegairahan internal penduduk (termasuk petani) tinggi serta didukung dengan fasilitas dan mutu layanan publik yang tinggi pula. Kecenderungannya, akses yang tinggi ditakar berdasarkan jarak lokasi ke pusat-pusat pelayanan publik (*public service*) yang secara spasial identik dengan ibukota propinsi dan ibukota kabupaten/kota. Pada perkembangannya, para pakar perencanaan wilayah menempatkan jarak lokasi sebagai salah satu determinan utama didalam analisis akses. Hal ini tentunya didasari oleh pemikiran bahwa jarak lokasi sangat terkait dengan eksistensi fasilitas lainnya, seperti jalan, angkutan, telepon, listrik, media komunikasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.

Akses berhubungan terbalik dengan waktu, upaya dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi barang dan jasa. Akses berhubungan dengan kebutuahan dasar, berhubungan dengan aspek kesejahteraan sosial dan berhubungan dengan aspek ekonomi. Indikatornya tidak hanya didasarkan atas akses pada berbagai sumber informasi dan kepemilikan media komunikasi, tetapi juga dapat dideteksi dari pengertian, sikap, kontak dengan sumber informasi, kekosmopolitan, hubungan baik, tingkat partisipasi sosial, sikap, persepsi, dan sebagainya. Secara faktual, yang dimaksud akses desa-desa adalah kemampuan desa menjangkau sumber-sumber daya produktif, seperti modal, teknologi dan informasi. Kemampuan masyarakat desa mendapatkan modal secara tepat, kemampuan mendapatkan atau mengusahakan lahan, kemampuan mendapatkan dan menggunakan teknologi secara tepat, kemampuan mendapatkan harga yang menguntungkan dan kemampuan mendapatkan lokasi pasar potensial, merupakan indikator aksesibilitas seseorang.

Akses riil masyarakat desa terhadap sumber-sumber produktif (informasi, modal, sarana produksi dan pasar) diduga semakin meningkat seiring dengan membaiknya jaringan jalan dan sarana angkutan (transportasi). Transportasi diartikan sebagai kegiatan perpindahan orang dan barang dari suatu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan)

dengan menggunakan sarana angkutan. Menurut **Parikesit dkk (2003)**, lalu lintas dapat merangsang tumbuhnya pasar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya. Jalur lalu lintas juga merupakan pembuka bagi masuknya jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi dan transfortasi. Secara sosial, jalan dapat pula berperan sebagai media (*channel*) interaksi sosial ekonomi --media komunikasi fisik-- antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan akan menjadi lebih efektif dan efisien jika eksistensinya didukung dengan fasilitas transfortasi, terutama jalan yang menghubungkan kota-kota kecamatan dengan pusat-pusat pertumbuhan. Jalan tidak hanya berperan sebagai jalur mobilitas, tetapi telah membentuk pola jaringan sosial (*social networking*), pola jaringan komunikasi (*communication networking*) dan pola jaringan ekonomi (*economic networking*).

Meratanya akses masyarakat terhadap listrik, terutama di Pulau Jawa, secara kausalitstik diduga telah meningkatkan akses masyarakat terhadap media komunikasi seperti radio dan televisi. Kecenderungannya, tingkat keterbukaan (*cosmopolite*) masyarakat terhadap informasi pun semakin meningkat. Sementara itu, secara fisik-administratif, sarana (*means*) koperasi dan kelompoktani hampir ditemukan di setiap desa (minimal satu KUD dalam satu kecamatan). Pemerintah juga telah mengembangkan beberapa kelembagaan pertanian dan pedesaan yang baru, seperti kelompok swadaya masyarakat (KSM), asosiasi petani, gabungan kelompok tani dan kelembagaan agribisnis lainnya. Secara umum, **Parikesit dkk (2003)** menyatakan bahwa tingkat aksesibilitas menggambarkan keberdayaan sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat yang juga turut menentukan kedinamisan usaha ekonomi produktif masyarakat, termasuk usahatani petani.

BAB II
METODE PENELITIAN

2.1 Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*desk study*), yaitu suatu metode penelitian yang didasarkan atas data sekunder, literatur-literatur dan hasil-hasil kajian terkait dari berbagai sumber. Literatur yang dikaji difokuskan kepada literatur yang berkaitan dengan tujuan studi, terutama yang berkaitan dengan akses-akses daerah studi, sumber-sumber produktif, peraturan perundang-undangan tentang desa, transportasi, komunikasi dan organisasi-organisasi.

2.2 Data dan Instrumentasi

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan tahunan, kabupaten dalam angka, *review* hasil-hasil penelitian yang telah ada dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian, serta data-data terkait yang telah dikumpulkan oleh berbagai institusi yang terkait seperti: dinas perhubungan, dinas koperasi dan usaha kecil menengah, dinas perdagangan, dinas pertanian, BPS, dan sebagainya.

2.3 Analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan IRAP (*Integrated Rural Accessibility Planning*). Selanjutnya, hasil-hasil analisis akan dideskripsikan secara kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak aksesibilitas terhadap pembangunan pedesaan akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi.

2.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada tahun 2006, suatu kondisi yang relatif masih utuh, karena belum terjadi pemekaran Bandung Barat.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Agroekosistem Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung yang luasnya mencapai 307.370 ha, memiliki geomorfologi yang bervariasi (dataran danau, satuan pematang homoklin, dan satuan kerucut gunung api) dengan tipe iklim B1, suhu rata-rata 18°C–29°C, dan curah hujan 1450 mm/tahun. Secara alamiah, kondisi tersebut telah menyebabkan bervariasinya struktur hidrologi dan agroekosistem Kabupaten Bandung. Kecenderungannya, karakteristik sosial dan usahatani petani pun menjadi bervariasi. Keragaman geomorfologi, topografi dan hidrologi telah pula menyebabkan terbentuknya *"urban corridor"* Barat–Timur, dengan sumbu yang menghubungkan Padalarang (sebelah Barat) dan Cileunyi (sebelah Timur), dan koridor Barat Daya Soreang–Banjaran. Secara administratif, Kabupaten Bandung berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang di sebelah Timur, Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta di sebelah Utara, Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur di sebelah Selatan, Kabupaten Cianjur di sebelah Barat, serta Kota Bandung dan Kota Cimahi di bagian tengah **(Lampiran 4)**.

Kabupaten Bandung yang terletak diantara 6°41'–7°19' LS dan 107°22'–108°5' BT, meliputi 91.68 % dari Cekungan Bandung. Rata-rata ketinggian minimum 110 m dan maksimum 2.429 m dari pemukaan laut, dengan tingkat kemiringan mulai 0–8 %, 8–15 %, hingga di atas 45 %. Berdasarkan ketinggian tempat, tingkat kemiringan, dan komoditas yang banyak diusahakan, diketahui bahwa 13 kecamatan (32,56%) terletak di agroekosistem dataran tinggi berbasis sayuran, 17 kecamatan (39,53%) terletak di agroekosistem dataran medium berbasis palawija, dan 13 kecamatan (27,90%) terletak di agroekosistem sawah berbasis padi. Secara umum, tata wilayah Kabupaten Bandung cenderung menunjukkan pola radial-lateral dengan inti perkembangan tetap di Kotamadya Bandung dan Kota Cimahi, kemudian menyebar di sekitar jalan-jalan akses (pusat pertumbuhan baru) yang kemudian semakin meluas ke arah pinggiran kota dan pedesaan.

Agroekosistem Dataran Tinggi Berbasis Sayuran adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki geomorfologi satuan kerucut gunung api di sebelah timur laut, utara, dan

selatan Kota Bandung, yang meliputi: Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, Pacet, Ibun, Paseh, Cimeunyan, Lembang, Parongpong, dan Cisarua. Sayuran dan teh merupakan komoditas dominan yang diusahakan di ekotipe ini. Sebagian kecil petani mengusahakan buah-buahan, palawija, dan padi beirrigasi pedesaan atau tadah hujan. Sebagian besar masyarakat di ekotipe yang sangat intensif dan paling tinggi tingkat modernisasi pertaniannya ini, beretnis Sunda. Meskipun tingkat keterbukaan masyarakat di ekotipe ini sangat tinggi (kosmopolit), namun keberadaan dan keterlibatan etnis lain sangat sedikit sekali (hanya dalam kegiatan pemasaran dan penyediaan sarana produksi pertanian). Pangalengan dan Lembang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi pertanian di koridor bagian selatan dan utara Kabupaten Bandung. Secara ekologis, sebagian besar wilayah ekotipe ini berupa vegetasi hutan dan perkebunan.

Agroekosistem Dataran Medium Berbasis Palawija adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki geomorfologi berupa satuan pematang homoklin di sebelah barat dan perbukitan di sebelah timur Kota Bandung, yang meliputi: Cikancung, Cicalengka, **Nagreg**, Arjasari, Banjaran, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, Cipongkor, Batujajar, Cileunyi, Cilengkrang, Padalarang, Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan. Sebagian besar lahan di ekotipe ini mengandalkan pengairan dari hujan (tadah hujan), oleh karena itu, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, dan padi ladang, menjadi komoditas yang banyak dikembangkan oleh petani di ekotipe ini, disamping buah-buahan dan sedikit sayuran dataran medium. Beberapa kecamatan di ekotipe ini memiliki irigasi pedesaan dan atau irigasi setengah teknis, oleh karena itu dikembangkan pula usahatani padi sawah (terutama pada sawah-sawah bertopografi miring). Namun secara ekonomis, hingga kini belum ditemukan komoditas unggulan (selain jagung) dari ekotipe ini. Sebagian besar masyarakatnya beretnis Sunda, namun karena intensitas migrasi sirkuler masyarakat ekotipe ini (terutama ke perkotaan) cukup tinggi, maka asimilasi dan akulturasi budaya dengan etnis non Sunda pun cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan ekotipe lainnya, penduduk miskin di ekotipe ini merupakan yang terbanyak (74.430 jiwa). Cicalengka, Banjaran, Cililin, Cilengkarang, Cileunyi, dan Padalarang, merupakan pusat-pusat pertumbuhan di ekotipe ini. Tingkat konversi lahan di ekotipe ini semakin meningkat seiring dengan mulai intensifnya pembangunan perumahan dan industri.

Agroekosistem Sawah Berbasis Padi adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki geomorfologi berupa dataran danau, yang meliputi: Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Pameungpeuk, Katapang, Soreang, Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Ngamprah. Dataran rendah di Cekungan Bandung ini hampir seluruh lahannya mendapat pengairan dari irigasi teknis. Ekotipe yang dilalui oleh puluhan anak sungai Citarum ini terkenal dengan lahan sawahnya yang subur, yang sekaligus menempatkannya sebagai lumbung padi bagi Kota dan Kabupaten Bandung, disamping ikan dari kolam (empang). Secara umum, tingkat konversi lahan di ekotipe ini sangat tinggi, terutama ke pemukiman dan industri. Meskipun etnis Sunda masih dominan, namun berbagai etnis telah tinggal di ekotipe ini, terutama di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri. Lebih dari separo kecamatan di ekotipe ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Bandung. Secara ekologis, tingkat pencemaran lingkungan (baik karena limbah industri maupun domestik) di ekotipe ini, sangat tinggi. Secara umum, perubahan sosial dari masyarakat yang semula berbudaya hidrolik ke masyarakat berbudaya industri dan atau dari masyarakat yang berbudaya pedesaan ke masyarakat yang berbudaya kota, berjalan sangat cepat di ekotipe ini.

3.2. Tingkat Aksesibilitas Kabupaten Bandung

Secara geografis, akses penduduk (termasuk petani) Kabupaten Bandung atas berbagai sumberdaya produktif (terutama informasi) cenderung semakin tinggi seiring dengan semakin terbuka dan pesatnya pembangunan di Kota Bandung. Berdasarkan data BPS Tahun 2005 dan dengan mengacu kepada konsep akses sebagaimana diuraian pada paragraf sebelumnya, maka diketahui bahwa secara geografis lebih dari separo (53,5 %) kecamatan di Kabupaten Bandung berkategori akses tinggi (berjarak 8–24 Km ke ibu kota Propinsi Jawa Barat/ Kota Bandung), 30 % berkategori akses sedang (25-41 Km), dan 16,5 % berakses rendah (42-57 Km). Berdasarkan jarak dari kota kecamatan ke pusat pemerintahan kabupaten, maka diketahui bahwa 37 % kecamatan berkategori akses tinggi (berjarak 6-29 Km), 40 % berkategori akses sedang (berjarak 30-53 Km), dan 23 % berkategori akses rendah (berjarak 54-74 Km). Rongga, Gununghalu, Cipongkor, dan Cipeundeuy, merupakan empat kecamatan yang paling rendah aksesnya (berjarak 47-74 Km ke ibu kota Propinsi Jawa Barat dan ibu kota Kabupaten Bandung). Sedangkan Margahayu, Margaasih, Lembang, Cimenyan, Katapang, dan Banjaran merupakan kecamatan yang paling tinggi aksesnya (berjarak 6-8 Km) ke berbagai sumber-sumber produktif. Kecenderungannya, akses desa-desa (dalam atau antar zona agroekosistem) atas pusat pemerintahan pun sangat bervariasi **(Tabel 3.1)**.

Tabel 3.1. Tingkat Aksesibilitas Desa Atas Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Kota Bandung (Propinsi Jawa Barat) Berdasarkan Zona Agroekosistem, Tahun 2002.

Zona	Tipe Agroekosistem	Banyak Desa	Akses Desa Atas Ibu Kota Kabupaten (%)			Akses Desa Atas Ibu Kota Propinsi (%)		
			Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Sawah Berbasis Padi	128	76.56	17.19	6.25	83.59	16.41	-
2.	Lahan Kering Berbasis Palawija	190	35.11	31.91	32.98	47.37	26.84	25.79
3.	Dataran Tinggi Berbasis Sayuran	128	30.47	37.50	32.03	57.03	22.66	20.31

(Sumber: Data BPS 2002, Diolah)

Berdasarkan Tabel 3.1, maka dapat disimpulkan bahwa desa-desa yang berada di zona 2 dan zona 3 relatif rendah aksesnya atas ibukota kabupaten. Rendahnya akses desa-desa tersebut lebih disebabkan oleh jarak yang jauh, rendahnya sistem pelayanan sarana

transfortasi, dan rendahnya mutu kelembagaan pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu pemicu masyarakat desa berakses rendah untuk menuntut pembentukan kabupaten baru, atau memisahkan diri dari Kabupaten Bandung. Meskipun pembentukan kabupaten-kabupaten baru --seperti Bandung Timur dan Bandung Barat—terdorong oleh nuansa politis pembentukan Bandung Metropolitan, namun hal tersebut jelas merupakan preseden buruk bagi Kabupaten Bandung, untuk itu perlu dikembangkan sistem pelayanan publik berbasis jaringan, yang memungkinkan terjangkau secara efektif dan efisien oleh masyarakat desa berakses rendah. Jika tidak, maka kecenderungan meningkatnya tuntutan memisahkan diri dari desa-desa berakses rendah akan semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya tekanan politis dan membaiknya jalur-jalur antar kota dan fasilitas kota-kota terdekat yang terakses dan mampu memberikan pelayanan secara nyata dan bermutu.

Secara riil, aksesibilitas kota-kota di Cekungan Bandung akan semakin terbuka seiring dengan ditingkatkannya pelayanan lalulintas jalur utara (Bandung-Subang), jalur tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang), jalur tol Bandung-Sumedang (Cileunyi-Cimalaka), dan Jalur Pantai Selatan Jawa Barat. Menurut **Berdan (1989)** dan **Polanyi (1957)**, lalu lintas dapat merangsang tumbuhnya pasar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya. Jalur lalu lintas juga merupakan pembuka bagi masuknya jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan transfortasi. Secara sosial, jalan dapat pula berperan sebagai media (*channel*) interaksi sosial ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan akan menjadi lebih efektif dan efisien jika eksistensinya didukung dengan fasilitas transfortasi, terutama pada jalan yang menghubungkan kota-kota kecamatan dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Tabel 3.2. Kondisi Jalan di Kabupaten Bandung Tahun 2003 Berdasarkan Jenis Jalan, Panjang Jalan, dan Jenis Permukaan Jalan.

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (Km)	Jenis Permukaan Hotmik (%)			Jenis Permukaan Aspal (%)			Jenis Permukaan Batu (%)		
			B	R	RB	B	R	RB	B	R	RB
1	Jalan Negara	85,42	71,07	24,71	4,21	-	-	-	-	-	-
2	Jalan Provinsi	202,06	65,45	32,39	13,29	-	-	-	-	-	-
3	Jalan Kabupaten	1.214,08	37,42	3,08	2,27	17,45	33,28	3,84	-	0,99	-
4	Jalan Desa	1.944,12	-	-	-	23,45	49,83	9,42	6,56	10,04	-

(Sumber: Kabupaten Bandung dalam Angka Tahun 2003, Diolah).
Keterangan: B (Baik), R (Rusak), RB (Rusak Berat)

Bagi Kabupaten Bandung, jalan (**Tabel 3.2)** tidak hanya sekedar berperan sebagai jalur mobilitas, tetapi telah membentuk pola jaringan sosial (*social networking*), pola jaringan komunikasi (*communication networking*), pola jaringan kerja (*net working*), dan pola jaringan ekonomi (*economic networking*). Konsekuensinya, jika kondisi jalan rusak dan atau penataan arus lalulintasnya (terutama di pusat-pusat pertumbuhan) kurang efektif, maka otomatis akan menghambat aksesibilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat menuju atau dari pusat-pusat pertumbuhan.

Menurut **BPS (2003)**, di Kabupaten Bandung tercatat ada sekitar 22.670 unit kendaraan ronda empat (33,07% merupakan angkutan umum), dan 76.144 unit kendaraan roda dua. Pada umumnya, sarana angkutan umum tersebut menghubungkan kota-kota kecamatan dengan Kota Bandung, baik melalui trayek dari atau ke Terminal Cicaheum, Leuwipanjang, Kebun Kelapa, Cileunyi, dan ke 840 terminal lokal lainnya di Kabupaten Bandung. Bagi sebagian masyarakat yang berada di koridor barat-timur (Padalarang-Nagreg, Padalarang-Purwakarta, dan Cileunyi-Sumedang), akses ke pusat pertumbuhan pun dilayani langsung dengan Bus AKAP (Antar Kota Antar Propinsi), mini bus, mikro bus, dan kereta api (Nagreg-Cicalengka-Bandung-Padalarang). Ketersediaan fasilitas transfortasi, baik yang berada di wilayah Kabupaten maupun Kota Bandung, secara riil telah mendorong pesatnya pembangunan sektor industri, sektor pertanian, mobilitas penduduk (migrasi sirkuler), dan meningkatnya akses masyarakat atas beberapa sumberdaya produktif lainnya, seperti: perbankan, kesehatan, pendidikan formal atau pendidikan non formal, perumahan, pasar, dan sebagainya **(Tabel 3.3).**

Pada Tabel 5.3, terlihat bahwa akses masyarakat Kabupaten Bandung (terutama akses atas tiga komponen utama penyusun indikator indeks pembangunan manusia), relatif masih rendah, kecuali akses atas energi listrik. Kertasari, Nagreg, Rongga, Parongpong, Solokan Jeruk, Rancabali, dan Gununghalu tercatat sebagai kecamatan yang masih rendah aksesnya atas fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Secara fisik, meskipun sarana kesehatan, koperasi, dan jaringan telepon cukup memadai di setiap kecamatan, namun secara fungsional masih rendah. Pada umumnya, telepon umum hanya eksis di sekitar kota kecamatan (sekitar 30% desa kota). Secara kuantitatif, baru 10 kecamatan yang memiliki puskesmas DTP dan secara proporsional kabupaten ini

baru terlayani oleh tujuh rumah sakit. Pada umumnya, kecamatan-kecamatan yang rendah aksesnya atas berbagai sumberdaya produktif adalah kecamatan baru (atau pemekaran).

Tabel 3.3. Tingkat Aksesibilitas Kecamatan Kabupaten Bandung Atas Sarana Kesehatan, Pendidikan, dan Sumber Produktif Lainnya, Tahun 2003.

No	Sumber-Sumber Produktif	Tingkat Aksesibilitas Kecamatan (%)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Sarana Pendidikan	27,91	45,51	25,58
2.	Sarana Kesehatan	34,88	37,21	27,91
3.	Jaringan Irigasi	23,26	30,23	41,86
4.	Koperasi	51,16	39,53	27,91
5.	Pasar/Toko Saprotan	15,25	30,45	54,30
6.	Supermarket/Swalayan	17,78	40,00	42,22
7.	Sarana Kursus	39,52	25,58	35,00
8.	Lembaga Keuangan (Bank)	23,00	54,00	23,00
9.	Pegadaian	-	14,00	86,00
10.	Jaringan Telepon	48,88	16,24	34,88
11.	Jaringan Listrik	81,40	11,63	6,97
11.	Sarana Ibadah	39,53	23,26	37,21
12.	Pondok Pesantren	25,58	34,89	39,53
13.	Karang Taruna	4,65	41,86	53,49
14.	Kelompok Tani	11,63	32,56	55,81
15.	Industri Kecil	30,23	32,56	37,21
16.	Industri Sedang	25,59	13,95	60,46
17.	Industri Besar	16,28	41,86	41,86

(Sumber: Data BPS Tahun 2003, Diolah)

Meratanya akses masyarakat atas listrik, secara kausalitstik telah meningkatkan akses masyarakat atas media komunikasi seperti radio dan televisi. Kecenderungannya, tingkat keterbukaan (*cosmopolite*) masyarakat Kabupaten Bandung atas informasi pun semakin meningkat. Sementara itu, sarana (*means*) koperasi dan kelompoktani yang secara fisik dan administratif hampir ditemukan di setiap desa (minimal satu KUD dalam satu kecamatan), belum banyak memberikan kontribusi yang berarti kepada petani. Kecenderungannya, sebagian besar (84,81%) kelompoktani dan koperasi yang ada, berada pada kondisi tidak aktif, bahkan pakum. Ironinya, keadaan tersebut tidak lantas tersubstitusi oleh pasar dan toko saprotan yang memadai. Akibatnya, kelembagaan petani dan pedesaan secara keseluruhan hidup dalam ketidakjelasan (*anomie*). Meskipun pada perkembangannya pemerintah menghadirkan beberapa kelembagaan pertanian dan pedesaan yang baru, seperti: kelompok tani, KUD, Bank, P3A, BPP, STA (Sub Terminal

Agribisnis), dan kelembagaan ekonomi pasar agribisnis lainnya, namun tetap tidak menunjukkan hasil yang signifikan yang berupa pelayanan yang bermutu kepada petani. Lemahnya tingkat partisipasi, manajemen, dan sosialisasi, diduga menjadi penyebab utama gagalnya *capacity buliding* tersebut. Akibatnya, tengkulak, bandar, dan sesama petani tetap menjadi institusi alternatif bagi sebagian besar petani. Sementara itu, toko atau agen-agen penyalur sarana produksi pertanian masih terbatas jumlah dan mutu layanannya (hanya eksis di beberapa kota kecamatan). Secara umum, tingkat aksesibilitas sebagaimana termaktub dalam Tabel 3.3, menggambarkan keberdayaan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat yang juga turut menentukan kedinamisan usahatani petani.

3.3. Akses Usahatani Kabupaten Bandung

Sebagai wilayah penyangga utama Kota Bandung (Ibukota Propinsi Jawa Barat), Kabupaten Bandung yang geomorfologi dan hidrologinya khas, memiliki lahan pertanian yang sangat subur. Oleh karena itu, tata guna lahan di Kabupaten Bandung hingga tahun 2003 masih didominasi oleh pertanian, disamping pemukiman dan industri. Dari luas total wilayah ini (307.370 ha), sekitar 160.143 Ha (52,10%) lahannya diperuntukkan bagi usahatani. Dari jumlah 52,10 persen tersebut, sekitar 56.772 Ha (35,45%) merupakan lahan basah (sawah) dan sebagian besar sisanya (64,55%) merupakan lahan kering, baik lahan kering berbasis sayuran di dataran tinggi maupun lahan kering berbasis palawija di dataran medium.

Secara riil, kompetisi penggunaan sumberdaya (seperti tanah, air, dan tenaga kerja) antar sektor di Kabupaten Bandung sangat tinggi. Implikasinya, setiap tahun luas lahan pertanian terus berkurang sekitar 0,86-1,07 persen, baik karena beralih fungsi maupun beralih guna ke peruntukkan lain. Pada periode 10 tahun terakhir (1993-2003), luas kepemilikan atau pengusahaan lahan petani di kabupaten ini telah mengalami penurunan sebesar 35,42 persen, yakni dari rata-rata 0,48 Ha pada tahun 1993 menjadi 0,31 Ha pada tahun 2003 **(BPS, 2003)**. Bersamaan dengan itu, telah pula terjadi pengurangan jumlah buruh tani dan petani pemilik penggarap. Hasil penelitian **Setiawan (2004)** di tiga desa sawah di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa terjadinya penurunan luas lahan, penurunan jumlah petani pemilik penggarap, dan jumlah buruh tani, sesungguhnya terkait dengan berkurangnya luas lahan pertanian dan menurunnya minat generasi muda

untuk terjun ke sektor pertanian. Kecenderungannya, justru terjadi peningkatan jumlah petani penyakap (*pemaro*). Relasi sakap tampaknya menjadi strategi adaptasi atau *trend* baru yang diterapkan oleh para pemilik lahan guntai.

Pada umumnya, alih fungsi lahan di Kabupaten Bandung terjadi karena perluasan kota, pembangunan industri, pembangunan perumahan/pemukiman, dan fasilitas lainnya. Sedangkan alih guna terjadi karena pencemaran limbah industri, banjir, kekeringan, pengembangan komoditas baru, dan tidak berfungsi atau beralih fungsinya jaringan irigasi. Bersamaan dengan itu, terjadi pula peningkatan intensitas pertanian dan pembukaan lahan pertanian baru pada areal-areal hutan (alih guna hutan). Akibatnya, eskalasi kerusakan hutan dan hilangnya daerah resapan air (*catchment area*) semakin meluas, hingga terbentuk lahan-lahan kritis **(Tabel 3.4)**.

Tabel 3.4. Luas Lahan Kritis dan Komposisinya di Kabupaten Bandung Tahun 2003.

No	Kondisi Lahan	Luas Lahan (Ha) dan Komposisinya	Lokasi
1.	Luas lahan kritis	35.668 ha (potensi, semi, dan kritis) tersebar di 36 kecamatan dan 279 desa. Penyebab utama: longsor, banjir, kekeringan, penurunan muka tanah, sedimentasi (rataan 112,5 m^3/ha/ tahun), penurunan produktivitas (*leveling-off*)	Semua Zona
2.	Luas hutan kritis	12.752 ha (11.000 ha di Bandung Selatan dan 1.752 ha di Bandung Utara)	Zona 3 (Satuan Kerucut Gunung Api)
3.	Lahan tergenang banjir	4.500 ha atau meningkat 29% dari angka 3.500 ha dan terjadi lebih cepat dari tahun sebelumnya.	Zona 1 (Dataran Danau)
4.	Lahan kekeringan	4.174 ha atau meningkat 34% dari angka sebelumnya, 3.115 ha.	Semua Zona
5.	Lahan terpapar limbah	700 ha (20 ha masuk kategori tidak dapat ditanami, 270 ha rusak berat, dan 400 ha rusak sedang dan ringan). Tersebar di 12 kecamatan di Dataran Danau.	Zona 1 (Dataran Danau)

(Sumber: Dinas Pertanian dan Kabupaten Bandung dalam Angka Tahun 2003, Diolah).

Kondisi-kondisi lahan pertanian sebagaimana tertera pada Tabel 5.4, hingga kini masih belum tertanggulangi. Berbagai proyek yang ditujukan untuk itu telah diimplementasikan (seperti GNRLH), tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kecenderungannya, masalah utamanya tidak tersosialisasikan kepada masyarakat dan pengendaliannya tidak dilakukan secara partisipatif. Mungkin hanya usaha pembesaran

ikan di lahan-lahan atau sawah-sawah tergenang saja yang cukup berhasil hingga mencapai luas 2.268,84 Ha.

Kurangnya informasi, lemahnya apresiasi, dan rendahnya partisipasi dari *stakeholders*, diduga menjadi penyebab utama tidak berkelanjutannya penanganan lahan kritis di Kabupaten Bandung. Menurut **Pakpahan (2004)**, hal itu terjadi karena penanganan atau pengelolaannya lebih didudukkan dalam kerangka pemikiran "keproyekan", dan tidak disertai dengan pemberdayaan dan penegakkan hukum pada semua pelaku. Akibatnya, berbagai proyek yang diimplementasikan menjadi objek penyimpangan baru, termasuk korupsi informasi. Karena arus informasi dari atas ke bawah tidak meyakinkan, sementara arus informasi dari bawah ke atas tidak terartikulasikan, maka wajar jika sebagian besar masalah yang kompleks tersebut belum tertanggulangi. Akibatnya, muncul aksi-aksi perlawanan dari masyarakat atau dari petani dalam bentuk konflik terbuka maupun perlawanan yang bersifat laten **(Tabel 3.5)**.

Tabel 3.5. Tingkat Konplik Antara Petani dengan Pihak-Pihak Terkait Lainnya di Kabupaten Bandung Tahun 2002.

No	Ragam Konplik	Persen Kecamatan Berdasarkan Derajat Konflik (%)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Petani vs Industri	41.86	20.93	37.21
2.	Petani vs Perhutani	48.84	16.28	34.88
3.	Petani vs PDAM	16.28	23.26	60.46
4.	Petani vs Formulator	39.53	32.56	27.91
5.	Petani vs Petani	-	27.91	72.09
6.	Petani Anggota vs Pengurus Kel.Tani/ P3A	-	-	100.00
7.	Petani vs LSM/LBH	2.33	-	97.77

(Sumber: Pusat Dinamika Pembangunan Unpad, 2002).

Konflik antara industri dengan petani (masyarakat) pada umumnya terjadi di ekotipe sawah, faktor pemicunya adalah limbah industri, perebutan air permukaan dan air irigasi (terutama di musim kemarau), dan rendahnya penyerapan tenaga kerja setempat. Sedangkan konflik antara petani dengan perhutani terjadi di ekotipe dataran tinggi dengan faktor pemicunya adalah penyerobotan lahan hutan, tuntutan hak guna dan pengelolaan lahan, serta penebangan liar. Perebutan penggunaan air permukaan, pelanggaran kesepakatan, dan tidak jelasnya kontribusi atas petani (P3A), menjadi faktor

utama terjadinya konflik petani dengan PDAM (juga terjadi di ekotipe sawah). Modus eksploitasi dari Formulator, kecemburuan sosial, penyimpangan KUT, penyimpangan ganti rugi oleh LSM/LBH, dan pengambilan keputusan searah oleh pengurus, juga merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik yang terjadi di berbagai ekotipe.

Secara ekologis, implikasi dari tingginya tingkat pencemaran dan kecenderungan meningkatnya dosis penggunaan pestisida dan pupuk an-organik dalam sistem pertanian yang begitu intensif di Kabupaten Bandung (terutama di dataran tinggi dan sawah) adalah resurgensi hama penyakit tanaman, menurunnya kualitas air, pelandaian produktivitas lahan (*leveling-off*), pelandaian produktivitas tanaman, dan in-efektifnya aplikasi inovasi pertanian. Kecenderungannya, kondisi tersebut direspon oleh petani dengan meningkatkan dosis pupuk atau pestisida kimia per satuan luas. Jika meminjam istilah **Popkin (1979)**, tindakan petani tersebut jelas sangat rasional, karena senyatanya mereka (terutama petani di dataran tinggi) mengusahakan komoditas yang sangat responsif terhadap pupuk dan pestisida sintetis. Hanya rasionalitas dan kegairahan mereka terpolarisasi pada pengendalian risiko yang secara ekologis tidak berbasis keberlanjutan.

Diluar sisi rasionalitasnya, ketergantungan petani atas berbagai input luar, sejatinya terjadi karena modernisasi pertanian yang diintroduksikan tidak disertai dengan perlindungan sosial (*social protection*) atas diri dan komunitas petani. Akibatnya, perubahan sosial budaya dan degradasi kearifan lokal berjalan secara sporadis. Semua itu, jelas dapat mengancam keberlanjutan dan identitas pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung. Salah satu faktor penyebab rendahnya *social protection* atas petani adalah melemahnya eksistensi dan kinerja kelembagaan lokal. Sementara itu, kelembagaan-kelembagaan formal tidak mensubstitusinya secara efektif. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan beberapa kebijakan pertanian (seperti: *Rice Estate*, *Corporate Farming*, Ketahanan Pangan, dan sebagainya), dan telah mengembangkan beberapa kelembagaan pertanian (seperti: 14 penangkar padi, 1 penangkar jagung, 20 penangkar kentang, 10 penangkar bawang merah, dan sebagainya), termasuk menciptakan jaringan kerjasama dengan berbagai kelembagaan pendukung di Kota Bandung dan Departemen Pertanian, namun akses kecamatan atas institusi yang ada masih belum signifikan **(Tabel 3.6)**.

Tabel 3.6. Akses Kecamatan Atas Kelembagaan Ekonomi Pendukung Agribisnis di Kabupaten dan Kota Bandung. Tahun 2003.

No	Kelembagaan Pendukung	Tingkat Akses Kecamatan (%)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	20.93	41.86	37.21
2.	Dinas Industri dan Perdagangan Agro	55.81	25.58	18.61
3.	Bank Agro	55.81	25.58	18.61
4.	Supermarket dan Hypermarket	55.81	25.58	18.61
5.	BPTP Lembang	20.93	41.86	37.21
6.	Balai Benih Induk Kentang	41.86	46.51	11.63
7.	Perusahaan Agribisnis dan Agroindustri	32.56	39.53	27.90
8.	Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan LPM	55.81	25.58	18.61
9.	Pasar Induk Caringin, dan Gede Bage	55.81	25.58	18.61

(Sumber: Data Sekunder BPS 2003, Diolah)

Secara umum, pesatnya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan (seperti *supermarket* dan *hypermarket*) di Kota Bandung dan kota-kota besar lainnya di Indonesia telah pula menggairahkan sektor pertanian, terutama usahatani di zona agroekosistem dataran tinggi. Membaiknya infrastruktur telah pula memperluas pasar produk pertanian dari Kabupaten Bandung ke pasar-pasar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Bahkan beberapa komoditas (terutama sayuran), sudah mampu menembus pasar internasional, seperti: Jepang, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa, dan Amerika Serikat. Beberapa perusahaan agribisnis yang eksis di Kabupaten Bandung adalah PD. Hikmah (di Pangalengan), PD. Corona (di Cisarua), PD. Bimandiri di, PD. Karya Setia, PD. Puteri Segar, PD. Double I, PD. Kemfarm (di Lembang), dan sebagainya.

Khusus untuk kelembagaan penyuluhan pertanian, secara fisik akses seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung atas lembaga tersebut masuk kategori tinggi. Namun secara fungsional, akses petani atas layanan kelembagaan penyuluhan sangat rendah. Sangat sulit bagi petani untuk berkomunikasi atau berdiskusi dengan para penyuluh, kecuali jika ada proyek-proyek pemerintah. Secara umum, sebagian besar penyuluh menyadari bahwa mereka lebih disibukan oleh pekerjaan-pekerjaan non penyuluhan (administratif), akibatnya mereka ketinggalan oleh para petani. Sementara transfer informasi atau hasil-hasil penelitian dari lembaga penelitian, lembaga pemberdayaan, dan perguruan tinggi, tidak berjalan. Kehadiran penyuluh-penyuluh swasata (baca:

formulator), pada kenyataannya lebih banyak memerankan sebagai *salles* sarana produksi pertanian, daripada menjalankan fungsi penyuluhannya.

3.4. Keragaan Akses Komunikasi Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung, secara geografis berada tidak jauh dari pusat-pusat pelayanan sosial, ekonomi, teknologi, transfortasi, dan informasi, yang pada umumnya berada di Kota Bandung (Ibukota Propinsi Jawa Barat). Secara teknis, fasilitas komunikasi kabupaten ini tidak dapat dipisahkan dari fasilitas komunikasi Kota Bandung dan Propinsi Jawa Barat. Secara spasial, seluruh daerah Kabupaten Bandung terjangkau oleh layanan informasi dari radio dan televisi. Begitupun media cetak, kini sudah menjangkau kota-kota kecamatan dan beberapa desa-desa terdekat **(Tabel 3.7).** Bahkan, seiring dengan semakin canggih dan meluasnya jaringan komunikasi di DKI Jakarta, maka Bandung dan Jakarta pun semakin merapat. Seiring dengan semakin meluasnya jaringan telephon, maka akses masyarakat ke jaringan internet pun semakin meluas. Begitu juga akses atas pusat-pusat pelayanan, seperti pasar induk, pemasok (*supplier*), modal, teknologi, dan informasi.

Secara umum, surat kabar (lokal maupun nasional) belum menjadi konsumsi harian masyarakat pedesaan (terutama petani). Hingga kini, pasar surat kabar masih terkonsentrasi di kota-kota kecamatan atau pasar. Oleh karena itu, baru masyarakat kelas menengah ke atas dan yang tinggal dekat dengan kota-kota kecamatan saja yang kuasa mengaksesnya. Meskipun beberapa media cetak ada yang berbahasa Sunda, namun mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia pun tidak dapat dengan mudah mengaksesnya. Secara ekonomi, harga surat kabar terlalu mahal bagi ukuran petani yang rata-rata berpendapatan rendah. Radio dan televisi merupakan media komunikasi dan sumber informasi yang secara fisik sudah terakses oleh sebagian besar penduduk di Kabupaten Bandung. Namun demikian, media komunikasi massa yang ada belum mampu memberikan informasi produktif kepada para petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Hasil penelitian **Parida (2003)**, menyimpulkan bahwa sebagian besar (98%) petani di dataran tinggi Kabupaten Bandung mengenal acara siaran pedesaan yang disiarkan oleh RRI Bandung, namun merespon negatif acaranya, baik atas waktu

penyiaran maupun materi yang disajikan. Secara umum, sangat sedikit radio swasta yang memberikan pelayanan informasi harga, teknologi, dan pesan pertanian lainnya.

Tabel 3.7. Tingkat Aksesibilitas Desa Atas Sumber Informasi di Kabupaten Bandung Tahun 2002.

No	Sumber-Sumber Informasi	Tingkat Aksesibilitas Desa (%)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Surat Kabar Lokal	44.50	22.93	32.57
2.	Surat Kabar Nasional	27.75	24.77	47.48
3.	Radio Komunitas	26.01	21.56	52.29
4.	Radio Umum	95.00	3.50	1.50
5.	Televisi	90.00	7.00	3.00
7.	Penyuluh Pertanian	9.86	29.59	60.55
8.	Toko Buku	6.88	44.50	48.62
9.	Telepon	44.84	33.63	21.53
10.	Internet	28.92	48.21	22.87
11.	Kantor Pos dan Giro	28.92	38.56	32.52

(Sumber: Data BPS Tahun 2002, Diolah)

Selain media massa, sumber informasi bagi masyarakat Kabupaten Bandung juga berupa institusi dan perorangan, seperti: tokoh tani, petani lain, aparat desa, penyuluh pertanian, pengusaha agribisnis, perusahaan mitra, perbankan, fasilitator atau formulator dari perusahaan sarana produksi atau alat mesin pertanian, lembaga advokasi atau lembagan bantuan hukum, tenaga pemberdaya, dan juga lembaga-lembaga sebagaimana tertera pada **Tabel 3.7.** Disamping itu, juga termasuk kelompok atau lembaga ekonomi pedesaan, seperti: organisasi simpan pinjam (BPR, Koperasi Simpan Pinjam, dan sebagainya), toko sarana produksi pertanian, toko buku, dan kelembagaan formal lainnya. Sedangkan media komunikasi lokal atau ajang-ajang dialog sosial (mengacu pada pendapat **Soetarto, 1999**) yang masih eksis ditengah-tengah masyarakat desa Kabupaten Bandung meliputi: kegiatan pengajian, karang taruna, pertemuan rutin (mingguan atau bulanan) desa, musyawarah, dan sebagainya. Disamping itu, juga terdapat jaringan-jaringan sosial seperti: penyebaran informasi, perlindungan sosial (keamanan pangan), dan keamanan lingkungan (siskamling).

Kelemahannya, meskipun informasi pertanian dari media massa ada tetapi sangat minim (tidak tepat waktu, tidak relevan dengan kebutuhan dan permasalahan petani, dan bersifat umum), penyuluh pertanian pemerintah (PPL) tetap tepuruk dan keterkaitannya dengan petani dan peneliti (triangulasi) semakin menunjukkan

kesenjangan yang serius (**World Bank, 1985; Kaimowitz, 1990**), formulator (penyuluh dari perusahaan swasta) cenderung mengejar kepentingan mereka yang dapat bersifat eksploitatif dan destruktif (**Roling, 1990**), LSM yang hubungannya semakin kuat dengan masyarakat bawah sebagian besar lemah dalam bidang teknik pertanian (**Chambers et al, 1989**), Pusat Informasi Pasar dan Pertanian (PIP) belum efektif, dan Kelompok Tani atau Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) belum bisa diandalkan (**van den Ban dan Hawkins, 1995**). Padahal bagi petani, informasi (atau inovasi) yang terkait dengan pertaniannya adalah kebutuhan yang bersifat dinamis. Kecenderungannya, informasi yang datang dari berbagai sumber dan media sangat variatif. Akibatnya, terjadi pembiasan atas informasi hingga membingungkan petani dalam menentuakan alternatif yang benar dengan yang keliru. Komersialisasi media komunikasi seringkali membiaskan kebenaran informasi, hal ini jelas menawarkan beragam pilihan kepada petani. Pada kenyataannya, petani lebih sering menderita kerugian akibat "terbuai" oleh rayu iklan (promosi), daripada keuntungannya. Kondisi demikian menanamkan trauma dan ketidakpercayaan pada sumber informasi. Akibatnya petani menjadi sangat berhati-hati dan bahkan tidak mempercayai sumber-sumber informasi, sekalipun sumber informasi tersebut menawarkan informasi yang benar dan sesuai dengan kebutuhan petani.

3.5. Keragaan Aksesibilitas Desa-Desa Contoh

Ketiga desa yang diteliti akan diuraikan secara desktiptif berdasarkan monografi dan data BPS tahun 2002-2003 yang menggambarkan keadaan nyata, sehingga diperoleh gambaran keragaman tempat-tempat yang diteliti, yang menurut Berlo turut mempengaruhi tingkat keberdayaan komunikasi petani. Substansi pembahasan akan pula dilengkapi dengan enam komponen fungsional berdasarkan konsep "*the typical system*" dari **Axin dan Torat (1972**), yaitu: 1) Komponen Produksi, meliputi: pengolahan tanah, pengelola operasional pertanian, penguasaan, dan pengusahaan tanah; 2) Komponen sarana pendukung, meliputi: individu, kelompok tani, organisasi petani, dan keagenan pendukung komponen produksi; 3) Komponen pemasaran, meliputi: individu, organisasi dan keagenan yang menerima produk dari komponen produksi, dan juga pergudangan, transfortasi, pengolahan hasil, dan konsumen lainnya; 4) Komponen lembaga pengaturan, meliputi: lembaga yang menangani bidang hukum dan kebijakan, pengawasan mutu, dan

pengaturan transaksi diantara komponen yang ada; 5) Komponen pengembangan Iptek, meliputi: lembaga penelitian, lembaga pengabdian pada masyarakat, laboratorium lapangan (penangkaran), balai benih, dan sejenisnya); dan 6) Komponen pendukung semua komponen, meliputi: lembaga penyuluhan, lembaga advokasi, pusat informasi, dan sejenisnya.

Desa Rancakasumba. Desa yang terletak di zona agroekosistem sawah berbasis padi di dataran danau Cekungan Bandung ini berjarak sekitar 3.5 kilometer dari ibukota kecamatan, 31 kilometer dari ibukota kabupaten, 28 kilometer dari Kota Bandung atau Ibukota Propinsi Jawa Barat, dan 10 kilometer dari pinggir jalan raya Bandung-Garut. Desa yang jalan utamanya sudah beraspal baik dan dilalui dengan trayek Bandung-Majalaya (PP) tersebut, dapat diakses dengan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda empat maupun roda dua, disamping beca dan delman. Secara administratif, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Bojong Emas di sebelah utara, Desa Mekarsari di sebelah selatan, Desa Sumber Sari di sebelah timur, dan Desa Solokanjeruk di sebelah barat.

Desa Rancakasumba yang luasnya sekitar 365 ha, sebagian besar (75.03 %) lahannya berupa sawah datar yang mendapat pengairan dari Irigasi Teknis Wangisagara dan Citarum. Padi merupakan satu-satunya komoditas yang diusahakan oleh sekitar 547 rumah tangga petani (29.81 %) dan 87 rumah tangga buruh tani (4.74 %) di daerah ini. Sebagian besar lahan pertanian dikuasai oleh orang yang tinggal di Kota Bandung (guntai) dan diusahakan oleh petani setempat melalui relasi sakap (maro). Pola tanam yang diterapkan oleh petani pada umumnya adalah padi-padi-bera (90%) dan padi-padi-padi (10%). Pola tersebut sangat dipengaruhi oleh debit dan ketersediaan air di Irigasi Teknis Wangisagara dan atau irigasi pompa dari Sungai Citarum. Adopsi teknologi pertanian di desa ini sudah sangat tinggi dan berjalan lama (sejak program Bimas digulirkan). Irigasi teknis, pompanisasi, traktor, varietas unggul, mesin perontok, pupuk, penggilingan padi, alat pengeringan padi, dan kredit, sudah menjadi hal yang biasa bersentuhan dengan petani di desa ini. Namun demikian, hingga kini aktivitas pertanian di desa ini belum didukung oleh institusi penyedia sarana produksi pertanian, KUD, maupun pusat informasi. Selama ini kebutuhan sarana produksi pertanian diperoleh petani dari Kecamatan Ciparai, Majalaya atau Rancaekek yang berjarak sekitar 8-10 Km.

Sementara pelayanan keuangan diperoleh masyarakat dari Koperasi simpan pinjam (Kosipa), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Baitul Mal wa Tanwil (BMT), yang tersedia di desa tersebut. Keberadaan Kelompok Tani Rancakasumba yang meraih predikat sebagai kelompok tani padi terbaik I di Jawa Barat dan Terbaik III di Indonesia (tahun 2001), pada kenyataannya baru berperan didalam penyaluran kredit (bantuan pemerintah), penyaluran benih padi, penyediaan pupuk, dan pemasaran hasil usahatani. Peran yang tinggi justru dilakukan oleh Pemerintahan Desa, seperti dalam pengaturan pola dan waktu tanam, pengendalian hama penyakit tanaman, dan penyuluhan. Selain kelompok tani, tengkulak, pemilik heuleuran, dan pasar umum, masih tetap menjadi institusi pemasaran utama bagi hasil usahatani para petani. Selain dari KTNA, informasi pertanian juga diperoleh para petani dari P3A, para penyuluh atau petugas Dinas Pertanian yang seringkali terjun ke lokasi percontohan (pilot project).

Desa yang dihuni oleh sekitar 9.174 orang penduduk ini, memiliki kepadatan penduduk sekitar 2.998 orang/km2, sex ratio 104, man land ratio 34 orang/ha, struktur usia penduduk produktif (22,01%), dan beban ketergantungan 38 (ringan). Secara riil, desa ini sudah "kosmopolit", dengan indikator: 1) Tingkat mobilitas penduduk (terutama ke Kota Bandung) sangat tinggi; 2) Bergairahnya aktivitas ekonomi, seperti industri dan perdagangan (termasuk perdagangan padi); 3) Setiap rumah tangga telah memiliki radio dan televisi; 4) 36% rumah tangga memiliki akses yang tinggi atas telepon pribadi atau telepon genggam (hand phone) dan surat kabar; 5) Sebagian besar masyarakat dapat berbahasa Indonesia; dan 6) 75% penduduk memiliki akses yang tinggi atas telepon umum. Namun demikian, hanya 10% penduduk yang tingkat pendidikannya sudah tinggi (di atas sekolah dasar). Akses masyarakat atas KUD masih rendah, dan begitu juga atas lembaga kesehatan. Secara umum listrik sudah terakses oleh seluruh rumah tangga. Beberapa kelembagaan lokal yang masih eksis dalam masyarakat Rancakasumba adalah pengajian, pertemuan rutin mingguan (minggonan) di desa, pertemuan kelompok tani, dan institusi lumbung. Aktivitas pertanian di Rancakasumba juga didukung dengan fasilitas lain yang ada di wilayak Kecamatan Solokanjeruk, seperti 15 buah Orari, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Balai Pembenihan Padi (Penangkar Benih Padi). Meskipun modernisasi dan industrialisasi sudah berkembang di masyarakat

Rancakasumba, namun budaya hidrolik masih tetap melekat pada diri petani, terutama pada petani yang berusia tua.

Desa Bojong. Desa yang terletak di zona agroekosistem lahan kering berbasis palawija di daerah dataran medium satuan pematang homoklin Cekungan Bandung ini, berjarak sekitar 2,5 kilometer dari ibukota kecamatan (waktu tempuh 10 menit), 55 kilometer dari ibukota kabupaten (waktu tempuh 1,5 jam), 35 kilometer dari Kota Bandung atau Ibukota Propinsi Jawa Barat (waktu tempuh 1,5 jam), dan 2 kilometer dari pinggir jalan raya Bandung-Garut. Desa tersebut dapat diakses dengan kendaraan bermotor, baik dengan kendaraan roda empat maupun roda dua. Namun karena kondisi jalan beraspal yang melalui desa tersebut kurang baik dan belum adanya trayek angkutan umum roda empat yang melaluinya, maka kendaraan roda dua atau ojek-lah yang menjadi sarana transfortasi utama di desa ini. Angkutan umum (trayek Cileunyi-Cicalengka-Nagreg) hanya masuk pada jam-jam tertentu saja, seperti pada pagi hari (ketika roda aktivitas ekonomi masyarakat mulai menggeliat). Secara administratif, desa ini berbatasan dengan desa-desa lahan kering lainnya, seperti Desa Citaman di sebelah utara, Kabupaten Garut di sebelah selatan, Desa Ciherang di sebelah Timur, dan Desa Mandalawangi di sebelah barat.

Desa Bojong yang luasnya sekitar 756 ha, sebagian besar (64,29 %) wilayahnya yang bertopografi bergelombang hingga berbukit, diperuntukan bagi pertanian lahan kering yang pengairannya sangat tergantung kepada air hujan (tadah hujan). Meskipun terdapat sedikit sawah (13,26 %), namun semuanya sawah tadah hujan (sawah guludug). Jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan merupakan komoditas yang banyak diusahakan oleh sekitar 543 rumah tangga petani (46,73 %) dan 443 rumah tangga buruh tani (38,12 %) di daerah ini. Pada umumnya, petani di desa ini berstatus petani pemilik tanah (23,48 %), petani pemilik penggarap tanah (26,48 %), petani penggarap/penyakap (26,48 %), dan buruh tani (32,48 %). Sebagian besar petani penggarap, menggarap lahan milik perhutani dan carik desa (bengkok) yang dikelola oleh desa. Sedangkan mereka yang berprofesi sebagai peternak, hanya sedikit (4,52 %). Pola tanam yang diterapkan oleh petani pada umumnya adalah tumpangsari (Jagung + Ubi Kayu + Kacang-kacangan + Cabe–Bera). Adapun pola dasarnya adalah Jagung + Ubi kayu-Bera atau Jagung-Ubi Kayu-Bera. Gairah usahatani petani yang sangat intensif pada musim hujan, pada dasarnya lahir dari

strategi adaptasi yang diterapkan petani dalam menghadapi kondisi lahan dan iklim yang begitu ekstrim.

Secara umum, adopsi teknologi pertanian modern oleh petani di desa ini sudah cukup tinggi dan berjalan bersama program pembangunan desa. Varietas unggul, alat pemipil jagung (lokal dan modern), pupuk konvensional, dan kredit, sudah menjadi hal yang biasa bersentuhan dengan petani di desa ini. Namun demikian, sebagian besar kebutuhan sarana produksi pertanian, pelayanan keuangan, informasi pertanian, dan pelayanan pemasaran tidak tersedia di desa ini, tetapi harus diakses ke Kecamatan Cicalengka yang berjarak sekitar 7-9 Km. Secara kelembagaan, aktivitas pertanian di desa ini didukung oleh Gabungan Kelompok Tani Ridho Manah yang sudah berbadan hukum koperasi. Kelompok Tani yang masuk kedalam jajaran kelompok tani terbaik di Kabupaten Bandung ini, pada kenyataannya baru berperan didalam penyaluran kredit (bantuan pemerintah), penyaluran benih jagung, dan simpan pinjam. Peran kelembagaan penyuluhan pertanian masih belum dirasakan oleh para petani, baik dari dinas maupun dari swasta (formulator). Secara umum, pemasaran hasil pertanian masih mengandalkan tengkulak, dan pedagang di pasar umum. Peran tokoh tani (KTNA) masih cukup dominan didalam proses adopasi dan diseminasi inovasi.

Secara demografis, desa yang dihuni oleh sekitar 4.444 orang penduduk ini, memiliki kepadatan penduduk yang masih rendah (sekitar 726 orang/km2), penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki (sex ratio 97), daya dukung lahan sudah cukup berat (man land ratio 9 orang/ha), struktur usia kerja penduduk produktif (23,09%), dan beban ketergantungan yang tergolong rendah 38. Secara riil, sebagian penduduk desa ini belum “kosmopolit”. Hal ini tampak dari masih cukup banyaknya rumah tangga yang belum memiliki radio maupun televisi. Dari 1.162 rumah tangga, baru 35 persen rumah tangga yang memiliki televisi, 75 persen rumah tangga memiliki radio, dan hanya 0,86 persen rumah tangga yang memiliki telepon. Gotong-royong dan kebiasaan berkumpul (termasuk nonton televisi ke tetangga) masih melekat kuat pada masyarakat Desa Bojong. Hal ini mengindikasikan bahwa desa tersebut masih menampakan corak pedesaannya. Secara kuantitatif, tingkat mobilitas penduduk ke kota atau ke pusat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, baik menjadi pedagang, sopir, buruh pabrik, dan buruh bangunan. Usahatani yang bersifat musiman dan belum adanya komoditas pertanian unggulan di

zona ini, merupakan dua pemicu utama terjadinya migrasi. Adapun mereka yang tidak melakukan migrasi, pada umumnya terjun ke aktivitas ekonomi lokal yang sangat bergairah (yang seringkali menjadi penopang pendapatan sebagian masyarakat terutama pada saat musim kemarau) yaitu industri batu bata merah. Secara kuantitatif, industri tersebut mampu menyerap sekitar 14.02 persen rumah tangga.

Secara umum, akses masyarakat atas telepon pribadi atau telepon genggam (hand phone), surat kabar, dan telepon umum masih rendah. Secara statistik, angka penduduk yang tingkat pendidikannya sudah tinggi (SMP, SMA, dan PT) hanya sekitar 4 persen. Akses masyarakat atas lembaga kesehatan masih rendah, karena fasilitas kesehatan terdekat (puskesmas pembantu) berjarak sekitar 6-7 kilometer dan puskermas utama terletak di Kecamatan Cicalengka. Ironi, sebagian rumah tangga masih ada yang belum tersentuh oleh layanan listrik. Belum optimalnya pelayanan publik dari institusi formal tersebut direspon secara positif oleh masyarakat lewat pengembangan kelembagaan-kelembagaan lokal. Beberapa kelembagaan lokal yang masih eksis dalam masyarakat Bojong dan menjadi ajang dialog sosial adalah pengajian ba'da jum'atan, pertemuan rutin mingguan (minggonan) di desa, pertemuan kelompok tani, karang taruna (kepemudaan), pos yandu, dan saung pertemuan. Namun demikian, sebagai kecamatan baru, Nagreg mulai membenahi fasilitas penting, seperti BRI, Koperasi Unit Desa (KUD), dan sebagainya.

Desa Cibodas. Desa yang terletak di zona agroekosistem dataran tinggi berbasis sayuran di satuan kerucut gunung api Cekungan Bandung ini berjarak sekitar 8 Km dari ibukota kecamatan (waktu tempuh 30 menit), 50 Km dari ibukota kabupaten (waktu tempuh dua jam), 21 Km dari Kota Bandung atau Ibukota Propinsi Jawa Barat (waktu tempuh satu jam), dan 5 Km dari pinggir jalan raya Bandung-Subang. Desa yang jalan utamanya sudah beraspal baik dan dilalui dengan trayek lokal (angkutan desa) tersebut dapat diakses dengan kendaraan bermotor, baik dengan kendaraan roda empat maupun roda dua. Desa yang identik dengan objek wisata Air Terjun (Curug) Cibodas Maribaya ini, secara administratif, berbatasan langsung dengan Desa Wangunharja di sebelah utara, Kecamatan Cimeunyan di sebelah selatan, Desa Suntenjaya di sebelah Timur, dan Desa Langensari di sebelah barat.

Desa Cibodas yang luasnya sekitar 1.273,44 ha, sebagian besar (76.60 %) lahannya berupa ladang yang pengairannya sangat tergantung kepada hujan. Luas lahan pertanian di desa ini adalah sekitar 530,60 ha (41.67%). Desa yang memiliki suhu udara rata-rata 10-29oC dan kelembaban 88% ini sangat cocok untuk agribisnis sayuran. Sayuran (kentang, pakcoy, asparagus, tomat, kubis, sawi, buncis, lombok, cabe merah, dan strauberi) merupakan komoditas utama yang diusahakan secara komersial oleh sekitar 1.306 rumah tangga petani (50.13 %) dan 843 (32.36 %) buruh tani di daerah ini. Sebagian besar lahan pertanian yang ada di desa ini dikuasai oleh orang yang tinggal di Kota Bandung (guntai) dan diusahakan oleh petani setempat melalui relasi sakap (*maro*). Pola tanam yang diterapkan oleh petani pada umumnya adalah tomat-kubis-buncis atau kentang-kubis-buncis. Adopsi teknologi pertanian modern di desa ini tidak jauh berbeda dengan desa-desa dataran tinggi lainnya yang jauh lebih dinamis jika dibandingkan dengan desa-desa di zona agroekosistem lainnya. Berbagai varietas unggul lokal dan impor, mulsa plastik, pupuk (organik atau buatan), pestisida (sintetis atau hayati/ nabati), manajemen pengelolaan, dan kredit, sudah menjadi hal yang biasa bersentuhan dengan petani di desa ini. Petani di desa ini menjadi lebih terbuka dengan dikembangkannya pola kemitraan antara petani dengan perusahaan-perusahaan agribisnis yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, pemasaran hasil, pengolahan, dan eskspor-impor komoditas pertanian dataran tinggi. Lokasi Lembang yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, sejatinya telah menyebabkan cepat dan intensifnya arus mobilitas penduduk, barang dan arus informasi ke dan dari Desa Cibodas.

Secara sosial ekonomi, aktivitas pertanian di Desa Cibodas juga didukung oleh institusi penyedia sarana produksi pertanian (kios-kios saprotan), dan fasilitas lainnya yang sebagian besar berkedudukan di Lembang, seperti: satu unit terminal, 25 buah kopersi simpan pinjam, satu Koperasi Unit Desa, satu unit BPKD, tiga unit badan kredit (micro finacial), dua unit pasar, enam unit bank (BUMN dan Swasta), dan 31 unit telepon umum. Di Desa Cibodas sendiri terdapat sekitar lima buah toko, 143 warung, satu unit toko sarana produksi pertanian, 17 mesjid, satu pondok pesantren, 25 Kelompok Tani (khususnya Kelompok Tani Mekar Tani Jaya), dan satu Asosiasi Petani (Asosiasi Prima Segar) yang meraih penghargaan dari pemerintah Indonesia (tahun 2004). Kelompok tani dan asosiasi tersebut, pada kenyataannya baru berperan didalam penyaluran kredit

(bantuan pemerintah), penyediaan saprotan, dan pemasaran hasil usahatani. Untuk pelayanan informasi, petani dapat mengakses secara langsung dari tokoh tani, bandar, tengkulak, kelompok tani, asosiasi petani, pasar lokal, pasar induk, radio dan perpustakaan komunitas yang berlokasi di desa tersebut.

Dibandingkan dengan kelompok tani dan asosiai petani, tengkulak atau pedagang pengumpul dan pasar (lokal dan induk) masih tetap menjadi institusi pemasaran utama bagi hasil usahatani para petani. Hingga tahun 2005, di desa ini terdapat sekitar lima orang bandar dan 50 orang tengkulak atau pedagang pengumpul. Sumber informasi lainnya adalah KTNA, penyuluh atau petugas Dinas Pertanian, dan perusahaan mitra atau supplier, seperti CV. Yan Fruit and Yan Vegetables, CV. Gress, Rotary Club, CV. Fresh Farm, CV. Bimandiri, dan sekitar 15 Supplier lainnya yang berlokasi di Lembang. Disamping itu, di Desa Cibodas juga terdapat satu unit Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), yaitu Tani Mandiri. Secara umum, surat kabar dan media cetak lainnya baru terakses oleh KTNA yang sekaligus berperan sebagai sumber informasi dan jembatan penghubung petani dengan pelaku pertanian lainnya.

Banyak berdirinya supermarket dan hypermarket di Kota Bandung, Botabek, dan Jakarta, berdampak nyata terhadap perkembangan jumlah supplier di Kecamatan Lembang. Selain yang telah disebutkan di atas, terdapat supplier lainnya, seperti: CV. Corona, CV. Double I, CV. Karya Setia, CV. Putera Karya Setia, CV. Puteri Segar, CV. Prima Segar, CV. Kemfarms, CV. Bina Cita, CV. Baby Fresh, dan sebagainya. Peningkatan jumlah supplier pada akhirnya diikuti pula dengan peningkatan jumlah bandar, tengkulak, dan pengepul. Secara riil, peningkatan-peningkatan tersebut telah berdapak pada menguatnya posisi tawar petani. Meskipun ditemukan adanya spesifikasi bandar berdasarkan komoditas, seperti bandar tomat, bandar brokoli, bandar buncis, dan sebagainya, namun persaingan antar bandar tetap tidak terelakan, baik dalam tawar menawar maupun dalam sistem kerjasama (kontrak ekonomi maupun kontrak sosial).

Desa yang dihuni oleh sekitar 8.348 orang penduduk ini, memiliki kepadatan penduduk sekitar 1.102 orang/km2 (padat), sex ratio 98.24 (lebih banyak perempuan), man land ratio 6.55 orang/ha (kurang dari tujuah, berarti ringan), dan struktur usia penduduk produktif. Secara riil, desa ini sudah "kosmopolit", dengan indikator: 1) Tingkat mobilitas penduduk (terutama ke Kota Bandung) sangat tinggi; 2) Tingginya

intensitas interaksi dengan pedagang dari luar, wisatawan domestik dan mancanegara, pengusaha saprotan, perusahaan mitra, dan para pedagang (baik pedagang di pasar tradisional maupun pasar induk); 3) Setiap rumah tangga telah memiliki radio dan televisi; 4) akses rumah tangga atas telepon pribadi atau telepon genggam (hand phone), surat kabar, dan radio komunitas, sudah terbuka; 5) Sebagian besar masyarakat dapat berbahasa Indonesia; dan 6) 85 persen penduduk memiliki akses yang cukup tinggi atas telepon umum. Penguasaan teknologi komunikasi oleh para petani di Desa Cibodas dan Lembang pada umumnya, telah mengakibatkan cepatnya arus informasi harga komoditas, termasuk di Pasar Induk Caringin (Bandung), Keramat Jati dan Senin (Jakarta), Tangerang dan Cibitung (Bekasi). Keberadaan Balitsa (Balai penelitian tanaman sayuran), BDAH (Balai Diklat Agribisnis Hortikultura), dan BPPT (Balai Pusat Penelitian dan Pengkajian Tanaman) di Kayu Ambon, juga turut meningkatkan intensitas modernisasi pertanian di desa ini.

Sebagian besar (83.60 %) masyarakat hanya berpendidikan SD, dan hanya 15.60 persen penduduk yang tingkat pendidikannya sudah tinggi (di atas sekolah dasar). Bagi anak-anak yang mata pencaharian orang tuanya sebagian besar bertani, bisa membaca dan menulis pun sudah dianggap cukup, selanjutnya adalah bertani. Namun demikian, mereka sesungguhnya menyadari bahwa pendidikan yang lebih tinggi itu penting, tetapi masalah biaya dan pandangan yang sempit, seringkali mematahkannya. Kondisi tersebut, jelas dapat memperlambat proses penyuluhan dan adopsi inovasi. Lebih jauh, akan lambat membaca peluang pasar dan dinamika pembangunan pertanian yang semakin terbuka.

Analisis Tingkat Aksesibilitas Desa-Desa Kasus. Berdasarkan keragaan agroekosistem dan komunikasi desa-desa kasus serta dengan memperhatikan data-data dasar dari BPS Kabupaten Bandung tahun 2002-2003, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akses desa sawah yang terletak di agroekosistem dataran danau lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa di zona agroekosistem lainnya (Tabel 3.7). Pada Tabel 3.7 terlihat bahwa akses desa sawah atas sumber-sumberdaya produktif sangat tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah sumber-sumber produktif yang terakses, yakni 21 sumber (80,77%) dari 26 sumber yang dianalisis . Sedangkan akses Desa Sayuran atas sumber-sumber produktif secara umum berkategori sangat rendah. Dari hasil analisis atas 26 sumber

produktif, diketahui bahwa akses Desa Sayuran atas dua sumber (7,69 %) tinggi, akses atas sembilan sumber (34,62%) sedang, dan akses atas 15 sumber (57,69 %) rendah. Seperti halnya Desa Sayuran, Desa Palawija yang terletak di urban corridor Barat-Timur pun memiliki tingkat aksesibilitas yang relatif rendah atas 26 sumber produktif yang dianalisis. Akses Desa Palawija yang tinggi hanya terjadi atas tiga sumber produktif (11,54%), akses atas 14 sumber (53,85 %) sedang, dan akses atas sembilan sumber (34,62 %) rendah.

Tabel 3.7. Tingkat Aksesibilitas Desa Kasus Atas Sarana Kesehatan, Pendidikan, dan Sumber Produktif Lainnya, Tahun 2003.

No	Sumber-Sumber Produktif	Nilai Aksesibilitas (∑Nilai Indikator X Bobot Indikator)		
		Desa Sawah	Desa Palawija	Desa Sayuran
1.	Akses Sarana Transfortasi	47 (3)	59 (1)	58 (2)
2.	Akses Sarana Telekomunikasi	77 (3)	87 (1)	80 (2)
3.	Akses Pasar Hasil Pertanian	61 (3)	83 (2)	87 (1)
4.	Akses Sarana Pendidikan	84 (3)	91 (1)	88 (2)
5.	Akses Sarana Kesehatan	99 (3)	115 (2)	127 (1)
6.	Akses Sumber Energi Listrik	22 (3)	36 (1)	31 (2)
7.	Akses Pusat Pemerintahan	56 (3)	62 (2)	78 (1)
8.	Akses Lembaga Keuangan	36 (3)	67 (2)	72 (1)
9.	Akses Lembaga Penelitian	62 (2)	78 (1)	56 (3)
10.	Akses Perusahaan Mitra (Inti)	61 (3)	83 (2)	87 (1)
11.	Akses Toko Sarana Produksi	83 (3)	95 (2)	109 (1)
12.	Akses Kelompok/ Asosiasi Petani	76 (2)	75 (3)	89 (1)
13.	Akses Koperasi/ KUD	39 (3)	59 (1)	54 (2)
14.	Akses Supermarket/Hypermarket	60 (3)	64 (2)	65 (1)
15.	Akses Sarana Kursus/Pelatihan	60 (3)	68 (2)	74 (1)
16.	Akses Pegadaian	60 (2)	58 (3)	64 (1)
17.	Akses Pondok Pesantren	60 (3)	63 (2)	65 (1)
18.	Akses Ajang Dialog Sosial	82 (1)	75 (3)	78 (2)
19.	Akses Industri Kecil	78 (1)	75 (2)	53 (3)
20.	Akses Industri Besar	57 (3)	68 (2)	85 (1)
21.	Akses ke Surat Kabar	84 (3)	91 (1)	88 (2)
22.	Akses Radio	77 (3)	87 (1)	80 (2)
23.	Akses Televisi Daerah	77 (3)	87 (1)	80 (2)
24.	Akses Matapencaharian	57 (3)	70 (2)	78 (1)
25.	Akses Pusat Aktivitas (Kota)	60 (3)	64 (2)	65 (1)
26.	Akses Pusat Penanganan Pasca Panen	59 (3)	68 (2)	70 (1)

(Sumber : Data BPS Tahun 2003, Diolah). Keterangan : Angka dalam Kurung Adalah Urutan Skala Prioritas (1= Lemah Aksesnya; 2 = Sedang Aksesnya; dan 3 = Tinggi Aksesnya)

Secara umum, terdapat dua sumber produktif yang harus mendapat perhatian serius di Desa Sawah, yaitu industri kecil dan "ajang-ajang" atau ruang dialog sosial. Sedangkan sarana transfortasi, sarana telekomunikasi, sarana pendidikan, energi listrik, lembaga penelitian, koperasi, surat kabar, radio, dan televisi daerah, merupakan sumber-sumber produktif yang harus mendapat perhatian di Desa Palawija. Sementara itu, di Desa Sayuran yang aktivitas pertaniannya sangat intensif, terdapat 15 sumber produktif yang harus menjadi prioritas, yaitu: pasar hasil pertanian, sarana kesehatan, layanan pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan mitra, toko sarana produksi pertanian, kelompok tani, supermarket/hypermarket, sarana pelatihan, pegadaian, pondok

pesantren, industri besar, sumber matapencaharian, public service, dan penanganan pasca panen.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah, metode dan hasil pembahasan, maka dapat ditraik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara geografis lebih dari separo (53,5 %) kecamatan di Kabupaten Bandung berkategori akses tinggi (berjarak 8–24 Km ke ibu kota Propinsi Jawa Barat/ Kota Bandung), 30 % berkategori akses sedang (25-41 Km), dan 16,5 % berakses rendah (42-57 Km). Berdasarkan jarak dari kota kecamatan ke pusat pemerintahan kabupaten, maka diketahui bahwa 37 % kecamatan berkategori akses tinggi (berjarak 6-29 Km), 40 % berkategori akses sedang (berjarak 30-53 Km), dan 23 % berkategori akses rendah (berjarak 54-74 Km). Rongga, Gununghalu, Cipongkor, dan Cipeundeuy, merupakan empat kecamatan yang paling rendah aksesnya (berjarak 47-74 Km ke ibu kota Propinsi Jawa Barat dan ibu kota Kabupaten Bandung). Sedangkan Margahayu, Margaasih, Lembang, Cimenyan, Katapang, dan Banjaran merupakan kecamatan yang paling tinggi aksesnya (berjarak 6-8 Km) ke berbagai sumber-sumber produktif.
2. Faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi lemahnya akses desa-desa adalah jarak yang jauh, rendahnya sistem pelayanan sarana transfortasi, dan rendahnya mutu kelembagaan pelayanan publik lainnya. Sedangkan faktor yang cenderung mempengaruhi kuatnya akses desa-desa di Kabupaten Bandung adalah meningkatnya pelayanan lalulintas jalur utara (Bandung-Subang), jalur tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang), jalur tol Bandung-Sumedang (Cileunyi-Cimalaka), dan Jalur Pantai Selatan Jawa Barat yang telah merangsang tumbuhnya pasar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya. Jalur lalu lintas juga merupakan pembuka bagi masuknya jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan transfortasi. Secara sosial, jalan dapat pula berperan sebagai media (*channel*) interaksi sosial ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan akan menjadi lebih efektif dan efisien jika eksistensinya didukung dengan

fasilitas transfortasi, terutama pada jalan yang menghubungkan kota-kota kecamatan dengan pusat-pusat pertumbuhan.

3. Implikasi dari lemahnya aksesibilitas desa-desa di Kabupaten Bandung adalah meningkatnya tuntutan pembentukan kabupaten baru, atau memisahkan diri dari Kabupaten Bandung. Secara sosial-ekonomi, implikasi dari lemahnya akses desa-desa telah pula mengakibatkan tidak berkembangnya ekonomi pedesaan. Namun demikian, secara sosial, meningkatnya akses desa-desa telah meningkatkan tingkat kriminalitas dan gaya hidup bebas dari perkotaan (luar desa). Secara sosiologis, meninguatnya akses desa-desa juga telah mengakibatkan meningkatnya angka migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan.

4.2 Saran

Perlu dikembangkan sistem pelayanan publik berbasis jaringan, yang memungkinkan terjangkau secara efektif dan efisien oleh masyarakat desa berakses rendah. Jika tidak, maka kecenderungan meningkatnya tuntutan memisahkan diri dari desa-desa berakses rendah akan semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya tekanan politis dan membaiknya jalur-jalur antar kota dan fasilitas kota-kota terdekat yang terakses dan mampu memberikan pelayanan secara nyata dan bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

Axinn dan Torat (1972). *Modernizing World Agriculture*. Michigan.

Biro Pusat Statistik (2003). *Sensus Pertanian Indonesia Tahun 2003*. Jakarta

Berlo, D.K. (1960). *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Collier, W.L, Santoso, K., Soentoro, dan Wibowo, R. (1996). *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Tahun*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Food Agricultural Organization (1999). *Urban Agriculture*. FAO, Roma.

Parikesit (2003). *Integrated Rural Accessibility Planning*. UGM.

Pakpahan, A. (2004). *Petani Menggugat.* Gapperindo, Jakarta.

Ponco, N. (1994). *Masyarakat Transisi Desa-Kota dan Sumberdaya Manusia*. Skripsi, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB, Bogor.

Popkin, S.L. (1986). *Petani Rasional*. Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

Purwasito, A. (2003). *Komunikasi Multikultural*. Muhamadiyah University Press, Yogyakarta.

Roling, N. (1990). *The Agricultural Research-Technology Transfer Interface: A Knowledge System Perspective*. Boulder, CO: Westview Press.

Sajogyo. (1993). *Agriculture and Industrialization in Rural Development in Dirkse et.al. (eds) : Indonesia's Experiences Under the New Order*. KITVL Press. Leiden.

Tubbs, S.L dan S. Moss (1996). *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar*. PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.